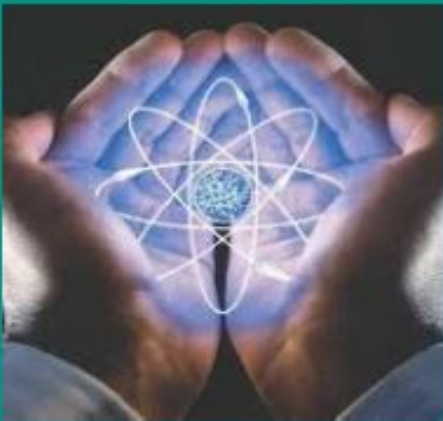


Table Of Content

Journal Cover 2
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
 Check this article update (crossmark) 5
 Check this article impact 5
 Cite this article 5
Title page 6
 Article Title 6
 Author information 6
 Abstract 6
Article content 8

Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

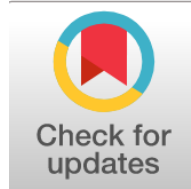
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

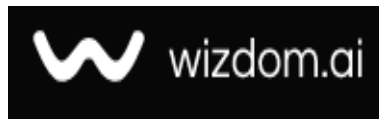
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Optimizing Community Aspiration Processes by Village Consultative Bodies

Optimasi Proses Aspirasi Masyarakat Melalui Badan Musyawarah Desa

Serly Febriyana, serlyfebriyana19@gmail.com, (0)

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Muhammad Habibi, habibi.mayangmaurai@yahoo.com, (1)

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Ahmad Yani, ahmadyani@uwgm.ac.id, (0)

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Deandlles Christover, deandllesc@gmail.com, (0)

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background: The absorption of community aspirations is a key indicator in establishing participatory and responsive village governance. **Specific Background:** In Bukit Raya Village, the Village Consultative Body (BPD) plays a central role as a liaison between the community and the village government, yet faces obstacles such as limited resources and low public participation. **Knowledge Gap:** While numerous studies have examined the general role of BPD, empirical research that specifically details the stages of aspiration absorption and the supporting or inhibiting factors at the village level remains scarce. **Aims:** This study analyzes the process of aspiration absorption by the BPD in Bukit Raya Village through four stages—identifying, accommodating, managing, and channeling aspirations—and identifies factors influencing its effectiveness. **Results:** Using a qualitative method and Miles and Huberman’s interactive analysis, the findings reveal that although cross-stakeholder synergy is relatively effective, the BPD lacks a formal method for collecting aspirations and faces challenges in participation, public understanding, and human resource capacity. **Novelty:** This research offers a detailed mapping of the stages and determining factors for successful aspiration absorption at the village level. **Implications:** The findings underscore the urgency of strengthening human resource capacity, participation mechanisms, and cross-sector collaboration to optimize the BPD’s role in achieving inclusive and sustainable village development.

Highlights:

- Identifies four key stages of aspiration absorption.

Academia Open

Vol 10 No 2 (2025): December

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.11431 . Article type: (Political science)

- Reveals gaps in participation and resource capacity.
- Proposes strategies for inclusive and sustainable governance.

Keywords: Village Consultative Body, Community Aspirations, Public Participation, Rural Governance, Sustainable Development

Published date: 2025-08-13 00:00:00

Pendahuluan

Pemerintahan desa di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan desa. Kehadiran BPD memberikan dimensi baru dalam demokratisasi di tingkat lokal, karena lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan masyarakat, tetapi juga sebagai pengawas dan mitra kerja kepala desa dalam merumuskan kebijakan publik. Salah satu tujuan utama pendirian BPD adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel [6]. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPD diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, dengan standar kompetensi yang tinggi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang diamanatkan oleh masyarakat desa [7]. Dalam konteks ini, BPD berperan penting dalam memperkuat struktur pemerintahan desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

BPD memiliki fungsi strategis dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi ini menegaskan bahwa BPD merupakan representasi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa, di mana partisipasi masyarakat direalisasikan melalui mekanisme perwakilan [10]. Dalam menjalankan peran legislatifnya, BPD bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan umum [5]. Komunikasi dua arah yang efektif antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan BPD dalam menjalankan perannya [3]. Dengan demikian, BPD tidak hanya menjalankan fungsi sosial sebagai perwakilan masyarakat, tetapi juga fungsi pemerintahan sebagai mitra kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seiring dengan perkembangan regulasi, peran BPD semakin berkembang, tidak hanya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa. Salah satu tugas utama BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat [7]. Musyawarah desa menjadi forum penting untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan kolektif terkait berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tradisi musyawarah desa telah lama menjadi bagian dari budaya lokal Indonesia, di mana setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat diupayakan untuk didengar dan dipertimbangkan secara adil [17]. Melalui musyawarah desa, BPD dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi warga.

Dalam kerangka desentralisasi, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini menuntut BPD untuk tidak hanya menampung aspirasi masyarakat secara lisan, tetapi juga secara tertulis, melalui tata kelola administrasi yang baik [30]. Administrasi yang tertib sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat dapat dievaluasi dan dimonitor secara terukur. BPD sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik di desa harus mampu mengimplementasikan kewajibannya secara profesional, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, BPD diharapkan dapat menjadi institusi yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD mengatur secara rinci tugas dan peran anggota BPD dalam penanganan aspirasi masyarakat. Proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD meliputi empat tahapan utama, yaitu penggalan, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi [30]. Pada tahap penggalan, anggota BPD berinteraksi langsung dengan kelompok masyarakat, termasuk kelompok marjinal, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka [7]. Aspirasi yang telah dikumpulkan kemudian ditampung melalui mekanisme administrasi, seperti Buku Data Aspirasi Masyarakat di kantor sekretariat BPD. Selanjutnya, aspirasi tersebut dikelola dan dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pemerintahan desa, sebelum akhirnya disalurkan kepada kepala desa melalui forum musyawarah BPD. Proses ini menuntut BPD untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta menjadi perantara yang adil dan tidak memihak.

Namun, dalam pelaksanaannya, BPD di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa permasalahan seperti pelaksanaan penyerapan aspirasi yang sering dilakukan pada malam hari karena kesibukan masyarakat, tuntutan masyarakat agar aspirasi segera direalisasikan, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua aspirasi dapat diwujudkan. Permasalahan ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD di Desa Bukit Raya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas proses tersebut [3], [6], [7].

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi secara alami, serta menekankan pada makna dan interpretasi yang diberikan oleh para partisipan [8]. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif. Denzin dan Lincoln juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Bukit Raya secara komprehensif dan mendalam.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Pemerintahan Desa dan BPD Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan relevansi dengan fokus penelitian serta kemudahan akses bagi peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara [4]. Menurut Wiratna Sujarweni, lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan dan harus dipilih secara cermat agar sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, Moleong menyarankan bahwa pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan kesesuaian antara teori substantif dan kenyataan di lapangan, serta faktor geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dinilai representatif untuk mengkaji proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur yang relevan [9]. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan dokumen dan data lain merupakan data tambahan [11]. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyerapan aspirasi di lapangan, wawancara digunakan untuk menggali informasi dari key informan dan informan, dokumentasi untuk memperoleh data tertulis, dan studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teori.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi [8]. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga data dinyatakan jenuh. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memilih data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antar data. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Bukit Raya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bukit Raya melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi. Pada tahap penggalian, BPD berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan dari setiap Rukun Tetangga (RT). Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keterbukaan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Meskipun demikian, penyerapan aspirasi sering kali dilakukan pada malam hari, mengingat banyaknya masyarakat yang memiliki kesibukan di siang hari, yang menjadi tantangan tersendiri bagi BPD dalam mengoptimalkan proses ini.

Selanjutnya, pada tahap penampungan aspirasi, BPD tidak memiliki metode khusus, tetapi berusaha untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Aspirasi yang diterima dicatat dalam Buku Data Aspirasi Masyarakat yang dikelola di kantor BPD. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam musyawarah desa. Hasil wawancara dengan anggota BPD menunjukkan bahwa meskipun tidak ada cara formal dalam menampung aspirasi, mereka tetap berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono yang menekankan pentingnya transparansi dan kolaborasi dalam pengelolaan aspirasi masyarakat.

Pada tahap pengelolaan, BPD melakukan proses secara kolektif melalui rapat internal, di mana seluruh anggota BPD dan perangkat desa berkolaborasi untuk merumuskan aspirasi yang telah dikumpulkan. Proses ini dimulai dari rapat RT di masing-masing dusun, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa untuk menentukan prioritas aspirasi yang akan dilaksanakan. Meskipun BPD telah memperkuat peran dan fungsinya melalui pelatihan anggota dan fasilitas yang memadai, masih terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi langsung masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap proses BPD. Tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk Desa Bukit Raya menurut jenis kelamin, yang menjadi salah satu indikator penting dalam memahami demografi masyarakat yang terlibat dalam proses penyerapan aspirasi.

| Keterangan | Jumlah (Jiwa) |
|------------------|---------------|
| Jumlah Laki-laki | 2,667 |

| | |
|-----------------------|-------|
| Jumlah Perempuan | 2,510 |
| Jumlah Total Penduduk | 5,177 |

Table 1. Jumlah Penduduk Desa Bukit Raya Menurut Jenis Kelamin

Tabel ini memberikan gambaran mengenai komposisi penduduk yang menjadi sasaran dalam penyerapan aspirasi, di mana mayoritas penduduk adalah laki-laki. Data ini penting untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi, serta untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam melibatkan semua elemen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam setiap tahapan proses tersebut.

Kemudian, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPD di Desa Bukit Raya telah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan resmi, seperti musyawarah desa, yang sering kali dihadiri oleh perwakilan saja. Hal ini mengakibatkan aspirasi yang disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh warga desa. Selain itu, masyarakat cenderung menginginkan agar aspirasi mereka segera direalisasikan, tanpa memahami bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan tahapan birokrasi yang harus dilalui. Keterbatasan waktu dan kesibukan masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penyerapan aspirasi, di mana banyak pertemuan dilakukan pada malam hari, yang tidak selalu memungkinkan bagi semua warga untuk hadir.

Di sisi lain, faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup adanya pelatihan bagi anggota BPD yang meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola aspirasi masyarakat. Selain itu, dukungan dari perangkat desa dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berkontribusi positif terhadap proses penyerapan aspirasi. Keterlibatan berbagai pihak ini menciptakan sinergi yang kuat dalam menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas BPD dan peningkatan komunikasi antara BPD dan masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dapat diakomodasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pembahasan mengenai proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Bukit Raya menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan untuk melibatkan masyarakat, tantangan dalam hal partisipasi tetap menjadi isu utama. Menurut Rauf dan Maulidiah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Namun, kenyataannya, banyak masyarakat yang merasa canggung untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam forum resmi, yang mengakibatkan aspirasi yang disampaikan tidak mencerminkan kebutuhan seluruh warga desa [5]. Hal ini sejalan dengan temuan Sugiyono yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan desa sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman terhadap fungsi dan peran BPD. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, seperti penyuluhan dan sosialisasi mengenai peran BPD dan pentingnya partisipasi dalam musyawarah desa.

Di sisi lain, faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota BPD berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat. Menurut Pasolong, pelatihan yang diberikan kepada anggota BPD dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya [8]. Selain itu, dukungan dari perangkat desa dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan sinergi yang positif dalam proses penyerapan aspirasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Prayitno dan Subagiyo yang menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak dalam pembangunan desa untuk mencapai hasil yang optimal [7]. Dengan demikian, penguatan kapasitas BPD dan peningkatan komunikasi antara BPD dan masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dengan baik dan berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan.

Optimalisasi penyerapan aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bukit Raya dapat ditingkatkan melalui kolaborasi strategis, tata kelola yang efektif, serta pemanfaatan teknologi dan dana desa yang terarah. BPD berperan penting dalam mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat, yang sangat krusial untuk keberhasilan inisiatif seperti pembangunan sumur resapan dan biopori guna pengelolaan air dan mitigasi banjir [12], [13]. Implementasi sumur resapan dan biopori di Desa Blawi terbukti efektif mengurangi banjir tahunan, terutama jika didukung oleh keterlibatan masyarakat dan tata kelola desa yang baik [13]. Integrasi konsep smart village yang mengadaptasi teknologi smart city juga dapat memperkuat upaya ini melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan sumber daya dan peningkatan partisipasi masyarakat [14]. Selain itu, optimalisasi dana desa yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan dan inklusif [15], [16]. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur desa sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana dan pelaksanaan proyek berjalan efektif, yang dapat difasilitasi oleh BPD melalui peran regulatif dan kolaboratifnya [15]. Penguatan hubungan antara BPD dan pemerintah desa, serta adopsi praktik tata kelola dan pengelolaan dana terbaik, memungkinkan desa mengatasi tantangan ekologis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek penyerapan aspirasi yang optimal [12], [15]. Model kemitraan seperti Public-Private Partnership (PPP) juga dapat diadopsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya [17], serta pembelajaran dari sektor lain seperti pengelolaan sampah terpusat yang terbukti efisien [18].

Namun, optimalisasi fungsi BPD masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tugas, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta minimnya pemahaman regulasi di kalangan anggota BPD [19], [20], [21], [22]. Hal ini menyebabkan keterlibatan yang pasif dan proses penyusunan peraturan desa yang kurang optimal, sehingga berdampak pada hasil tata kelola dan pembangunan desa [23], [24]. Fungsi pengawasan BPD, khususnya dalam penyerapan anggaran, juga sering terhambat oleh faktor kedekatan dengan masyarakat dan keterbatasan dana operasional [25]. Untuk meningkatkan efektivitas BPD, pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota sangat direkomendasikan, disertai penguatan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa [26], [20]. BPD juga berperan vital dalam perencanaan pembangunan desa, memastikan rencana pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat [23], [27]. Studi di berbagai desa menunjukkan bahwa peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal akibat kurangnya pemahaman dan keterlibatan dalam forum formal maupun informal [28], [29], [25]. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi BPD memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan kapasitas, kolaborasi pemangku kepentingan, serta adopsi praktik terbaik dari model yang telah terbukti sukses di sektor lain [17], [18]. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan signifikan, peran strategis BPD dalam tata kelola dan pembangunan desa sangat penting, sehingga upaya untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan fungsinya menjadi suatu keharusan [21], [24].

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bukit Raya merupakan suatu mekanisme yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penggalian hingga penyaluran aspirasi. Meskipun BPD telah berupaya untuk menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap, tantangan dalam hal partisipasi tetap menjadi kendala yang signifikan. Banyak masyarakat yang merasa canggung untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam forum resmi, yang mengakibatkan aspirasi yang disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh warga desa. Oleh karena itu, penting bagi BPD untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi mereka, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif untuk mendorong partisipasi yang lebih luas.

Di sisi lain, faktor pendukung seperti pelatihan bagi anggota BPD dan dukungan dari perangkat desa serta tokoh masyarakat berkontribusi positif terhadap efektivitas penyerapan aspirasi. Penguatan kapasitas BPD melalui pelatihan dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam menciptakan sinergi yang baik dalam proses penyerapan aspirasi. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan komunikasi antara BPD dan masyarakat, serta memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dapat diakomodasi dengan baik. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik dalam pengelolaan aspirasi masyarakat di tingkat desa, serta menyoroti pentingnya peran BPD dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

References

1. A. Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta, Indonesia: Ar-Ruzz Media, 2016.
2. A. Slamet, *Metodologi Studi Islam (Kajian Metode dalam Ilmu Keislaman)*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish, 2016.
3. B. Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta, Indonesia: CAPS, 2017.
4. D. Jiwandono, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish Publisher, 2015.
5. F. Endri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. Jakarta, Indonesia: PT Grafindo Persada, 2016.
6. F. Rahman, *Teori Pemerintahan*. Malang, Indonesia: UB Press, 2018.
7. G. Prayitno and A. Subagiyo, *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang, Indonesia: UB Press, 2018.
8. H. Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2017.
9. H. Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung, Indonesia: Alfabet, 2020.
10. I. K. Syafii, *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013.
11. L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya, 2016.
12. M. Yatim and H. Sukmana, "Village Consultative Body's Contributions to Development in Balongdowo Village," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 2024.
13. A. Q. Aini, S. Nabilah, and U. Umuronah, "Optimization of Biopori and Construction of Absorption Wells in Blawi Village to Overcome Annual Flood Disasters," *Dharma*, 2024.
14. D. K. Imron and F. E. Nababan, "Integrating Smart City to Smart Village Initiation: Potential and Aspiration," *Proceedings of the National Seminar on Village Development*, 2022.
15. A. Upe, J. Hos, M. Arsyad, S. Roslan, and R. Supiyah, "Optimizing Village Funds for Sustainable Development: A Technical Guidance Services in Tokowuta Village, Lasolo Sub-district," *Indonesian Journal of Community Services*, 2024.

16. W. Prihatiningtyas, "Optimisation of Village Funds in Achieving SDGs: Lesson Learned from East Java," *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, vol. 19, no. 4, pp. 567-579, 2023.
17. M. Sarman, "Partnership Model for Optimizing the Use of Village Funds," *Journal of Rural Development Studies*, 2019.
18. S. Anwar, S. Elagroudy, M. H. A. Razik, A. Gaber, C. P. C. Bong, and W. S. Ho, "Optimization of Solid Waste Management in Rural Villages of Developing Countries," *Clean Technologies and Environmental Policy*, vol. 20, no. 9, pp. 2033-2048, 2018.
19. M. A. R. Ardiyansyah and R. Adriadi, "Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar dalam Penyusunan Peraturan Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma," *Jurnal Manajemen Modal Insani dan Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 45-54, 2024.
20. S. O. Hay, K. Y. Stefanus, and C. W. T. Lamataro, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2024.
21. A. Z. Abidin, T. Soeltanto, and M. Ne'e, "Efektivitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa," *AKSES: Journal of Public & Business Administration Science*, vol. 8, no. 2, pp. 101-112, 2023.
22. I. Puansah, A. Sahbana, E. Zulfiqar, D. S. Pulungan, and I. A. Nasution, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, pp. 23-32, 2022.
23. S. Subiyanto and I. F. Agustina, "BPD's Role in Village Development Planning," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 2024.
24. A. W. K. Handayani, A. T. Rahmawati, and M. I. A. H. Malik, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa," *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 15, no. 2, pp. 77-88, 2023.
25. N. P. C. S. Devi, T. Erviantono, and N. W. Supriyanti, "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan)," *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 5, no. 2, pp. 115-124, 2016.
26. "Strategy for Implementing the Functions of Village Consultancy Agency in Distributing Community Aspirations," *International Journal of Advanced Research*, vol. 11, no. 4, pp. 456-463, 2023.
27. T. R. Astono, "Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 55-64, 2023.
28. I. Pangkey, W. Mawitjere, J. Langkay, J. E. H. Mokat, and T. Wawointana, "The Optimalization of Village Community Function in Accepting and Distributing Community Aspirations in Kemelembuais Village," *Journal of Rural Community Studies*, 2019.
29. A. Suprastiyo, "The Village Consultative Body Function in the Implementation of Village Government (A Study in Sambongwangan Village District of Randublatung Blora Regency)," *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, vol. 2, no. 5, pp. 873-877, 2016.